

**SKRIPSI**

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN WISATA MARITIM DI KOTA BATAM**

**Disusun dan diajukan oleh :**



**RISKA KURNIASARI**

**E 051 181 510**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
WISATA MARITIM DI KOTA BATAM

Disusun dan diajukan oleh

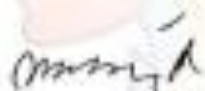
RISKA KURNIASARI  
E051 181 510

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Raayid Thaha, M.Si  
NIP. 19570707 198403 1 005



Dr. A. Lukman Iryan, S.IP, M.Si  
NIP.19790106 200501 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19540727 199103 1001

LEMBARAN PENERIMAAN  
SKRIPSI

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
WISATA MARITIM DI KOTA BATAM

Disusun dan diajukan oleh

RISKA KURNIASARI  
E051 181 510

Telah dipertbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, September 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si  
Sekertaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si  
Anggota : Prof. Dr. Nurlina, M.Si  
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si



Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si ( )  
Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ( )



## PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Kumiasari  
NIM : E061181510  
Departemen : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tugas Akhir : Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam  
Pengelolaan Wisata Maritim di Kota Batam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Hasanuddin atau Lembaga Penelitian lain kecuali kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang sudah lazim digunakan, karya tulis ini merupakan murni dari gagasan penelitian saya sendiri, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penguji.

Makassar, 29 September 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Riska Kumiasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Tinjauan Tentang Peran .....	10
2.1.2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah .....	12
2.1.3. Tinjauan Tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan...	16
2.1.4. Pengelolaan Pariwisata .....	21
2.1.5. Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata .....	22
2.1.6. Pengembangan Pariwisata .....	31
2.1.7. Governance .....	33
2.1.8. <i>Stakeholder</i> .....	35
2.1.8.1. Pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) pengelolaan destinasi wisata .....	38
2.1.9. Kolaborasi .....	40
2.1.9.1. Bentuk-bentuk perjanjian Kerjasama .....	45
2.2. Kerangka Konsep.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1. Lokasi Penelitian.....	51

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.3. Informan Penelitian.....	51
3.4. Sumber Data.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.6. Fokus Penelitian .....	53
3.7. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1. Gambaran Umum Kota Batam.....	36
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.....	36
4.1.3. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	36
4.1.4. Gambaran Umum Pulau Abang.....	36
4.2. Hasil Penelitian Mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam Pengelolaan Wisata Pulau Abang di Kota Batam .....	51
4.3. Pembahasan Penelitian Mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam Pengelolaan Wisata Pulau Abang di Kota Batam ....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. KESIMPULAN .....	51
5.2. SARAN.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2011-2021.....	3
Table 2. Pengunjung Wisatawan Lokal di Pulau Abang Pada Tahun 2017-2019 .....	3
Table 3. Pengunjung Wisatawan Mancanegara di Kota Batam Tahun 2017-2019 .....	3
Table 4. Jumlah Anggaran Pembangunan Pariwisata di Kota Batam Tahun 2017-2019 .....	4
Tabel 5. Tabel Informan Penelitian .....	50
Tabel 6. Tabel Indikator dan Kesimpulan Hasil .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	48
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam .....	59
Gambar 3. Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	87
Gambar 4. Peta administrasi Pulau Abang .....	90



## **ABSTRACT**

**RISKA KURNIASARI**, Principal Number E 051 181 510. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "Collaboration of Local Governments in Maritime Tourism Management in Batam City" under the guidance of **Prof. Rasyid Thaha, M.Si** and **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Sc.**

*This study aims to find out how the collaboration between local governments and policy makers in managing maritime tourism in Batam City is precisely on Abang Island.*

*The method used in this study is a qualitative method to express data descriptively. This research has been conducted at the Batam City Government Office, namely at the Batam City Culture and Tourism Office and at tourist destinations on Abang Island. This research was conducted from May to June in 2022. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and literature study, then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.*

*The results showed that in the management of Abang Island tourism objects, the Batam City Government collaborated with policy makers, namely the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). In its management, the Department of Tourism and Culture plays a role in the supervisory function and becomes a donor to the Abang Island tourist destination. And Tourism Awareness Group (Pokdarwis) as field implementers in carrying out activities submitted to the Tourism and Culture Office. The collaboration carried out by the government is to conduct socialization to the community, provide facilities assistance in the form of snorkeling equipment, camping equipment, and large umbrellas that are used to establish a place of sale.*

**Keywords: Department of Tourism and Culture, Batam City, Collaboration, Maritime Tourism.**

## **ABSTAK**

**RISKA KURNIASARI**, Nomor Pokok E 051 181 510. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Maritim Di Kota Batam” dibawah bimbingan **Prof. Rasyid Thaha, M.Si** dan **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan pemangku kebijakan dalam mengelola wisata maritim di Kota Batam tepatnya di Pulau Abang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Batam yakni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan pada objek destinasi wisata di Pulau Abang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga bulan Juni pada tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan objek wisata Pulau Abang Pemerintah Kota Batam berkolaborasi dengan pemangku kebijakan yakni kelompok Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam pengelolaannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam fungsi pengawasan dan menjadi donatur terhadap objek destinasi wisata pulau abang. Dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaksana lapangan dalam melakukan kegiatan yang diajukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana berupa bantuan alat snorkling, alat kemah, dan payung teduh besar yang digunakan untuk mendirikan tempat jualan.

**Kata Kunci : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kota batam, Kolaborasi, Wisata Maritim.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kota Batam terletak di lokasi yang sangat strategis berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, yang terdiri dari ± 400 pulau, memiliki letak strategis karena berada pada jalur pelayaran Internasional. Posisi Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan kota tersebut sebagai salah satu tujuan wisata dunia yang dikembangkan sebagai gerbang wisata menuju Bintan, Kepulauan Riau, Riau daratan, dan Sumatera (Ikhlās, dkk., 2019). Salah satu tempat destinasi yang sering dikunjungi wisatawan contohnya adalah wisata Pulau Abang.

Selain memiliki daya tarik seperti terumbu karangnya yang sangat indah dan air lautnya yang biru kehijauan, ternyata pantai ini juga sunset di sore hari. Akan tetapi pantai ini masih jarang dikunjungi karena minimnya informasi yang ada mengenai keberadaan pantai ini. Pada tahun 2011 Pulau Abang juga telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata republik Indonesia, sekitar 15hk luas nya terumbu karang tersebut dapat terjaga dengan baik. (Sumber web.humas.batam).

Selanjutnya berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa dengan mendapatkan gelar destinasi ternyata fasilitas yang ada di Pulau Abang tidak memadai seperti para pengunjung tidak

bisa menikmati perjalanan dengan biaya yang mahal ini dikarenakan masih menggunakan kapal milik masyarakat tidak hanya itu untuk alat *snorkeling* juga masih menggunakan milik pribadi masyarakat setempat, dan tidak ada nya penginapan serta listrik yang terbatas, hal ini harus segera dibenahi oleh Pemerintah dan Dinas Pariwisata untuk membenahi obyek wisata tersebut.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti informasi yang didapatkan bahwa sektor pariwisata di Pulau Abang belum berjalan secara optimal. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan devisa Negara, pendapatan masyarakat dan Daerah. Padahal Provinsi Kepri sudah membuat program Wonderfull Kepri dan Wonderfull Batam untuk menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk memperkenalkan wisata bawah laut (terumbu karang) indah nya *diving* dan *snorkeling* di Pulau Abang Kota Batam. Kondisi seharusnya sebuah tempat wisata harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti tempat parkir yang aman, tempat penginapan dan ketersediaan listrik serta air bersih. Sehingga pengunjung sangat nyaman saat menikmati kunjungan ke Pulau abang tersebut.

Berdasarkan dari data Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam, pendapatan normatif yang diperkirakan ditiap tahunnya terkadang dapat melebihi maupun kurang dari pendapatan normatif yang diperkirakan tiap tahunnya. Akan tetapi anggaran tersebut bukan hanya untuk pengembangan pariwisata saja.

**Table 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2011-2021.**

<b>Tahun</b>	<b>Normatif</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2011</b>	200,408,452,369.96	223,600,371,192.62
<b>2012</b>	718,917,202,500.17	282,531,929,496.20
<b>2013</b>	286,454,732,841.58	755,481,211,706.53
<b>2014</b>	295,371,630,135.64	889,125,863,329.19
<b>2015</b>	412,387,075,350.00	980,274,935,193.08
<b>2016</b>	493,894,310,637.85	919,458,234,861.44
<b>2017</b>	682,262,707,511.10	877,229,786,536.07
<b>2018</b>	664,841,547,747.92	1,087,382,952,137.38
<b>2019</b>	731,527,327,205.10	1,200,133,051,922.81
<b>2020</b>	812,250,585,148.34	1,020,281,524,021.82
<b>2021</b>	770,586,493,697.39	658,517,780,878.89

**Sumber : Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam (Tahun Pengambilan Data 2022)**

Adapun penjabaran jumlah anggaran pengembangan pariwisata di Kota Batam tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

**Table 2. Jumlah anggaran pembangunan pariwisata di Kota Batam tahun 2017-2019**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>REALISASI</b>
2017	11,614,438,300	10,929,937,433
2018	7,013,493,082	6,064,833,644
2019	7,688,079,886	6,755,119,548

**Sumber : Catatan Dinas Pariwisata Kota Batam (Tahun Pengambilan Data 2022)**

Berdasarkan tabel penganggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran dalam pembangunan pariwisata di Kota Batam mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 lalu pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Batam ditemukan data adalah sebagai berikut :

**Table 3. Pengunjung wisatawan lokal Pulau Abang Tahun 2017-2019**

TAHUN	JUMLAH PENGUNJUNG LOKAL
2017	174.230
2018	432.745
2019	2.000

**Sumber : Catatan Dinas Pariwisata Kota Batam (Tahun Pengambilan Data 2022)**

**Table 4. Pengunjung wisatawan mancanegara di Kota Batam 2017-2019**

TAHUN	JUMLAH PENGUNJUNG MANCANEGARA
2017	135.046
2018	115.551
2019	134.415

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam (Tahun Pengambilan Data 2022)**

Berdasarkan data diatas dari kunjungan waktu 2017 hingga 2019 jumlah pengunjung/wisatawan lokal selalu mengalami naik/turun, sedangkan jumlah pengunjung/wisatawan mancanegara mengalami

kenaikan, jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara tersebut sangat berpengaruh dalam penganggaran pembangunan pariwisata.

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2019 jumlah data pengunjung wisatawan di pulau abang adalah sebanyak 2.000 orang sementara untuk jumlah anggaran adalah sebanyak 6,755,119,548 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini kemudian mengakibatkan kurangnya perkembangan pengelolaan pembangunan objek wisata.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 28 Tahun 2016 tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu dinas terkait melakukan pengorganisasian dan pengendalian terhadap Wisata Pulau Abang di Kota Batam.

Ikhlas, dkk. (2019) menjelaskan bahwa pada tahun 2011 Pulau Abang juga telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sekitar 15hk luas nya terumbu karang tersebut dapat terjaga dengan baik. Wisata Pulau Abang memiliki potensi yang cukup besar dalam menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Abang. Potensi yang dimiliki Pulau Abang cukup beraneka ragam seperti *snorkeling*, pasir putih, pesona terumbu

karang dan berbagai hal lain yang dapat membuat para wisatawan tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, Nasional dan Global.

Dalam melakukan pengembangan pariwisata pemerintah juga dapat bekerja sama terhadap beberapa *stakeholder* untuk memanfaatkan semua faktor sumber daya yang terencana dalam mengelola sebuah objek wisata. Dalam hal lain ini dapat disebutkan sebagai Collaborative Governance untuk mengembangkan sebuah objek wisata.

Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengungsung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan wisata Pulau Abang memiliki potensi untuk memajukan obyek wisata dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak kolaborasi, dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus. Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan obyek



wisata. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengungsung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama dan meringankan beban pemerintah (Dimas, 2018).

Pemerintah setempat sudah seharusnya memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investai guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan juga dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Pulau Abang. Kota Batam dipastikan akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan secara tidak langsung akan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai peran pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan Pariwisata di Kota Batam. Penulis kemudian mengangkat judul “**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WISATA PULAU ABANG DI KOTA BATAM**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata Pulau Abang di Kota Batam?

2. Bagaimana kolaborasi antara *stakeholder* dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata Pulau Abang di Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata Pulau Abang di Kota Batam.
2. Mengetahui bagaimana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berkolaborasi dengan *stakeholder* dalam mengelola objek wisata Pulau Abang di Kota Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masukan kepada pemerintah daerah setempat (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan pariwisata di Kota Batam. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas masyarakat dalam pengelolaan tentang objek wisata sebagai upaya partisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan terhadap pemerintahan di Kota Batam.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Batam dalam mengkaji pengelolaan tentang objek wisata Kota Batam.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kota Batam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru bagi pemerintah daerah lainnya dalam rangka perwujudan pengelolaan pariwisata yang baik dan berkualitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

##### **2.1.1 Tinjauan Tentang Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang 10orma dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang 10orma dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang

dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015:215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 11ormati menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 11ormative. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 243).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto, 1987).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai

pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.

2. Peranan yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

### **2.1.2 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah**

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai 12arik1212m yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28).

Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan

13arik13 yang meliputi kegiatan 13arik1313ma1313, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan 13arik13 yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong, 2014).

Dari definisi diatas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, 13arik1313ma1313 dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bintoro Tjokroamidjojo (1991) dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa Pemerintah sebagai pemegang 14arik1414 untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid (2000 : 59) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (*public service*).
2. Fungsi pembangunan (*development*).
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*).
4. Fungsi pengaturan (*regulation*).

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 14arik14 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setelah UU Indonesia.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU Indonesia. 9 tahun 2015



tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

10. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat peripurna DPRD.

### **2.1.3 Tinjauan Tentang Dinas Pariwisata**

Dinas Pariwisata Kota Batam adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kota Batam yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan daerah di Kota Batam berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah "Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah".

Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai

organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997).

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya :

- 1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan kebudayaan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pariwisata mempunyai fungsi ;
  - a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka 17arik1717;
  - b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
  - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan
  - d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang sarana dan obyek wisata , bidang pengembangan dan promosi wisata, bidang seni budaya dan sejarah;

- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

#### **A. Bidang pengembangan dan pengelolaan daya 18arik wisata**

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 26 Tahun 2010 mengenai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pengembangan dan pengelolaan daya 18arik wisata sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengembangan dan pengelolaan daya 18arik Wisata mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang objek dan daya 18arik wisata.
- 2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Objek dan Daya 18arik wisata mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi objek dan daya 18arik wisata;
  - b. Menyusun kebijakan tekni pelaksanaan di bidang objek dan daya 18arik wisata;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang objek dan daya 18arik wisata;
  - d. Menyusun rencana kinerja dan menetapkan kinerja di bidang

- objek dan daya 19arik wisata;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan penerbitan retribusi perizinan atas penyelenggaraan objek wisata dan daya 19arik wisata;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan objek dan daya 19arik wisata;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penerbitan atas pengelolaan objk wisata dan daya 19arik wisata;
  - h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang objek dan daya 19arik wisata;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **B. Bidang pengembangan SDM kepariwisataan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 26 Tahun 2010 mengenai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pengembangan dan pengelolaan daya 19arik wisata sebagai berikut:

1. Seksi pengembangan Sumber Daya manusia Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataaan dalam rangka penetapan 20arik20 sadar wisata dan sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya manusia kepariwisataaan yang kompeten dan berdaya saing;
- g. menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan teknsi tenaga kepariwisataaan;

- h. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 21arik2121 pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- j. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. 21arik2121m laopran hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnta untuk mendukung kelancaran pelaksaasn tugas.

#### **2.1.4 Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata 21arik21 (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau 21arik2121m atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses disertai dengan usaha pertumbuhan tersebut sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh yang lebih baik.

Pujiono (1992:23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam kearah kebijaksanaan yang ditetapkan.

Menurut Marry Parker Follet (1997) mendefenisikan pengelolaan adalah sebuah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat didalamnya yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **2.1.5 Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata ( wisata bahari , wisata alam dan wisata budaya ).**

Dalam pengembangan pariwisata ada 3 elemen yang berperan dalam melakukan pengembangan yaitu :

##### **A. Kepariwisataan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 22arik22 wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.



Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2010), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

#### 1. Wisatawan

Adalah 23arik dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

#### 2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut ini :

- a. Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada 23arik23 ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya 23arik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b. Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hongkong berupaya menjadikan daerahnya

multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

- c. Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'être* atau utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

### 3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas

partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.

b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan kepariwisataan meliputi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Menghapus kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa

## B. Pariwisata

### 1. Pengertian pariwisata

Secara Etymologis kata “pariwisata” berasal dari *25arik25* Sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti *tourisme* (*25arik25* Belanda)

atau *tourism* (26arik26 Inggris). Kata bersinonim dengan kata *tour*. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini bersinonim dengan kata *travel*. Atas dasar tersebut pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan berkali-kali atau berputar putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam 26arik26 Inggris berarti *tour* (Yoeti ,1983:103).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat

setempat, wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

## 2. Jenis-jenis pariwisata

Berbicara tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (2006) dalam buku Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana adalah :

### a. Wisata Budaya

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan kegiatan budaya.

### b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya.

### c. Wisata Olah Raga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara, seperti Asia Games, Olimpiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain lain.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan 28arik2828m dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

e. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu komplek satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

f. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, Penobatan Ratu Inggris di London, dan sebagainya.

g. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-

ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.

h. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa.

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya 29arik29 menikmati segarnya tanaman beanekaragam dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija disekitar perkebunan yangdi kunjungi.

j. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam 29arik29 melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

k. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagaralam atau hutan lindung.

l. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari 30arik3030 daerah atau hutan.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik perorangan maupun rombongan yang berkunjung ketempat suci, kemakam- makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau 30arik30 sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman danti dakjarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Ditanah air kita banyak tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat- umat beragama tertentu ,misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Besakih di Bali,



Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya.

n. Wisata Bulan Madu

Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.

o. Wisata Petualangan

Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendaki tebing yang terjal, terjun ke dalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.

### C. Wisata Bahari

Wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal 31arik3131ma*), Fandeli (2002). Menurut Bengen (2001), wisata bahari oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat jenderal Pariwisata, dimasukkan pada wisata minat khusus, sedangkan wisata minat khusus didefinisikan sebagai perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena tujuan khusus mengenai sesuatu jenis

objek atau kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi atau daerah destinasi tersebut.

### **2.1.6 Pengembangan wisata**

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Menurut Suwanto (2002), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi:

#### **a. Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Daya 3tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya 3tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyamandan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- 3) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.

- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- 5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- 6) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Obyek daya' tarik wisata (Attraction)

Obyek daya' 34arik wisata (Attraction) yang mencakup keunikan dan daya 34arik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial. Menurut Suwena (2010: 88), atraksi atau obyek daya 34arik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (tourism resources). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lainlain.

Modal kepariwisataan menurut Suwena (2010:89) dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (in situ) dan di luar tempatnya yang asli (ex situ). Atraksi wisata dibedakan lagi menjadi atraksi penahan dan atraksi penangkap wisatawan.

#### b. Aksesibilitas (Accessibility)

Aksesibilitas (Accessibility) yang mencakup kemudahan sarana dan 34arik34 transportasi. Menurut Sunaryo (2013: 173), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai "segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk

mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo (2013: 173) menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

c. Amenitas (Amenities)

Amenitas (Amenities) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata. Sugiama (2011) menjelaskan bahwa amenitas meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (entertainment), tempat-tempat perbelanjaan (retailing) dan layanan lainnya”. French dalam Sunaryo (2013: 173) memberikan bahwa amenitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenitas akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.

d. Fasilitas umum (Ancillary Service)

Fasilitas umum (Ancillary Service) yang mendukung kegiatan pariwisata. Sunaryo (2013: 159) menjelaskan ancillary service lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, telekomunikasi, penginapan, rumah sakit dan sebagainya.

### **2.1.7 Governance**

Osborn dan Gaebler (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:2) menyebutkan bahwa *governance* adalah sebuah proses pemecahan masalah bersama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*the process in which we solve our problem and meet the society need*). Sedangkan menurut Meuthia Ganie dan Rahman (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:2) *governance* merupakan suatu usaha kolektif antara negara dan nonpemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Definisi lain mengenai *governance* yang dirumuskan IIAS (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:3) merupakan suatu proses dimana semua elemen dalam masyarakat kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan keputusan tentang kehidupan, pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut Abiradin Rosidi, dkk. (2013:3) perbedaan utama antara *government* dan *governance* adalah pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Konsep *government* menunjuk bahwa pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Sedangkan konsep *governance* mengandung arti bagaimana suatu bangsa yang terdiri dari berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan (*stakeholder*) yang pada dasarnya terdiri dari pemerintah, masyarakat serta nonpemerintah mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut UNDP governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu:

1. Negara atau Pemerintahan (state).
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector).
3. Masyarakat (society)

Kooiman (2003) "governance: new pattern of interaction between government and society" keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan governance mengindikasikan adanya pola relasi antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lain yang dapat berupa kolaborasi. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut terwujud dalam kegiatan distribusi kekuasaan, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial serta dalam upaya pengelolaan dan pengendalian berbagai masalah kolektif masyarakat dalam suatu negara. Berdasarkan definisi-definisi mengenai governance yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif good governance, pengelolaan obyek wisata alam dilakukan dengan cara kolaborasi dan 37arik3737ma sinergis oleh ketiga domain paradigma good governance, yaitu Pemerintah Daerah, 37arik37 swasta dan masyarakat. Pada setiap ranah governance, terdapat peran-peran yang berbeda namun mempunyai fungsi yang komplementer dengan ranah yang lainnya dalam membentuk sebuah 37arik37 governance (Wibowo dkk. 2002).

Adapun prinsip-prinsip juga menjadi karakteristik good governance yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, orientasi

pada 38arik3838ma, equity, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, profesionalisme (Wibowo dkk, 2002). Kemudian dalam governance merupakan bentuk reformasi government atau reformasi administrasi 38arik38 tradisional yang semula hanya dilaksanakan oleh 38arik3838 pemerintah yang sangat hierarki, lambat, syarat akan aturan terikat, kurang efektif serta kurang tanggap menjadi pelaksanaan administrasi 38arik38 yang pelaksanaannya lebih bebas dari aturan terikat, lebih kreatif, lebih siap mengambil resiko dan tanggap terhadap kepentingan 38arik38 dengan melibatkan usaha kolektif dari berbagai bentuk 38arik3838 atau *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat maupun 38arik3838 nonpemerintah.

#### **2.1.8 Stakeholder**

*Stakeholder* atau disebut juga pemangku kepentingan menurut Freeman (1983:91) dapat dipahami dengan mendefinisikan *stakeholder* menjadi dua definisi, yaitu definisi *stakeholder* secara luas dan definisi *stakeholder* secara sempit.

##### a. Definisi *stakeholder* secara luas

Sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dalam makna luas ini meliputi kelompok kepentingan 38arik38, kelompok penentang, serikat kerja, pekerja, segmen pelanggan, shareowners dan *stakeholder* lain dalam arti luas.

##### b. Definisi *stakeholder* secara sempit



Sekelompok orang atau individu dalam organisasi yang tidak mandiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. *Stakeholder* dalam arti sempit ini meliputi pekerja, segmen pelanggan, beberapa supplier, perwakilan kunci pemerintah, shareowners, beberapa institusi keuangan dan mereka yang dapat masuk sebagai *stakeholder* dalam arti sempit.

Menurut Grunig dan Hunt dalam Rawlins (2006:4) terdapat empat model hubungan yang dapat mengidentifikasi kerja sama *stakeholder* yang sesuai dengan literatur kerja sama yaitu hubungan enabling, hubungan fungsional, hubungan campuran dan hubungan campuran. Berikut ini merupakan pembahasan terkait empat model hubungan kerja sama *stakeholder* menurut Grunig dan Hunts.

a. Hubungan enabling

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang memiliki beberapa otoritas organisasi, seperti pemegang saham, kongers, badan regulator pemerintah serta dewan direksi, *Stakeholder* ini memungkinkan organisasi memiliki sumber daya dan otonomi untuk beroperasi. Ketika terjadi kemungkinan kerja sama terputus, sumber daya dapat ditarik dan otonomi organisasi dapat dibatasi.

b. Hubungan fungsional

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai fungsi pokok organisasi dan dibagi menjadi fungsi input, yaitu penyediaan tenaga kerja dan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa (seperti pekerja dan supplier)

dan fungsi output, yaitu konsumsi barang dan jasa (yang meliputi konsumen, distributor, dan retailers).

c. Hubungan 40arik4040ma

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai asosiasi atau kelompok yang dengan organisasi memiliki kepentingan bersama. *Stakeholder* dalam hubungan 40arik4040ma berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah, dan sering mencakup pesaing yang terlibat pada industri atau asosiasi 40arik4040ma4040l.

d. Hubungan campuran

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang tidak memiliki interaksi yang sering dengan organisasi, tetapi menjadi terlibat dalam aksi organisasi. *Stakeholder* yang dimaksud dalam hubungan campuran inisering muncul dalam situasi krisis. Yang termasuk dalam hubungan ini adalah media, komunitas, aktivis, LSM dan sekelompok kepentingan 40arik4040 lainnya. Berdasarkan identifikasi mengenai *stakeholder* tersebut.

*Stakeholder* dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan ini termasuk dalam hubungan 40arik4040ma. Hal ini karena *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pantai Payangan meliputi Pemerintah Desa Sumberejo dan komunitas wisata yang berasosiasi atau bekerja sama dalam hubungan campuran dalam pengelolaan seperti destinasi wisata Pantai Payangan dengan melibatkan

unsur masyarakat dan komunitas disekitar destinasi pariwisata Pantai Payangan.

#### **2.1.8.1 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Pengelolaan Destinasi Wisata**

Di suatu wilayah yang menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan dan termasuk di dalamnya usaha pengelolaan destinasi pariwisata, pada dasarnya tidak terlepas dari peran-peran atau kontribusi *stakeholder*. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, terdapat tiga komponen pelaku usaha dan *stakeholder* pengelolaan kepariwisataan di Indonesia yaitu:

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Peran dan fungsi Pemerintah dalam proses pengelolaan destinasi pariwisata sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berfungsi membuat regulasi pengelolaan kepariwisataan dalam bidang pengelolaan destinasi pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

- b. Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan Provinsi serta mengelola

destinasi pariwisata Provinsi sesuai Peraturan Daerah masing-masing Provinsi tentang rencana pembangunan. Pariwisata Provinsi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

c. Pemerintah Daerah kabupaten atau Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai peran utama untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain (42arik42 pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk 42arik4242m Peraturan Pariwisata Daerah Kabupaten atau Kota tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten atau Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

2. Dunia usaha

Dunia usaha merupakan swasta dalam perspektif governance memiliki andil sebagai penanam modal ataupun pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan atau pasar wisata. Semua yang dilakukan oleh dunia usaha adalah dalam rangka memperoleh keuntungan atau nilai tambah atau usahanya di bidang kepariwisataan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terdapat dua 42arik4242 dunia usaha (swasta) yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dua 42arik4242 tersebut meliputi:

- a. Badan Promosi pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPI).
- b. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang anggotanya meliputi ;
  1. Pengusaha pariwisata
  2. Asosiasi usaha pariwisata
  3. Asosiasi profesi
  4. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata
  5. Masyarakat pariwisata

### 3. Masyarakat

Masyarakat (sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan dan sebagai tuan rumah) Dalam usaha pengelolaan destinasi wisata, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha pariwisata, tenaga kerja maupun tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di lingkup destinasi pariwisata setempat. Menurut Sunaryo (2013:119) masyarakat memandang kegiatan kepariwisataan sebagai peluang untuk mendapatkan nilai tambah di bidang ekonomi maupun di bidang lain seperti kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan, dan kualitas lingkungan semakin baik. C dunia usaha dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata.

#### **2.1.9 Kolaborasi**

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses 44arik4444ma antar individu, individu dengan organisasi atau antar organisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat.

Dalam praktik administrasi 44arik44, kolaborasi merupakan strategi baru pelaksanaan governance untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan 44arik4444ma dari multiple *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, 44arik4444 non-pemerintah serta masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan 44arik44 atau mengelola program 44arik44. Definisi *collaborative governance* yang disampaikan oleh Ansel dan Gash (2007:544) tersebut menekankan pada enam kriteria penting yaitu:

1. Forum ini diprakarsai oleh 44arik4444-lembaga 44arik44 atau instansi.
2. Peserta dalam forum ini termasuk 44arik non-pemerintah.
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi dengan 44arik4444-lembaga 44arik44.
4. Forum secara resmi terorganisir dan memenuhi unsur-unsur kolektif.

5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan 45arik4545ma (bahkan jika 45arik4545ma tidak dicapai dalam prakteknya).
6. Fokus kerja sama adalah kebijakan 45arik45 atau manajemen 45arik45.

Morse dan Stephens (2012:566) berpendapat bahwa *collaborative governance* yaitu: “*Collaborative governance is this an umbrella term that encompasses various interweaving strands of public administration scholarship including intergovernmental and interagency collaboration, regionalism, cross-sector partnerships, public service networks (or simply network studies), consensus building, and public engagement.*”

Berdasarkan pendapat di atas tata 45arik45 kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan istilah umum yang mencakup berbagai untaian jalinan keilmuan administrasi 45arik45 termasuk kolaborasi antar pemerintah, antar 45arik4545, kedaerahan, 45arik4545ma lintas 45arik45, jaringan pelayanan 45arik45, pembangunan 45arik4545ma dan keterlibatan 45arik45. Sedangkan Ansell dan Gash (2007:545) menjelaskan *collaborative governance* sebagai berikut: “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision making process that is formal. Consencuc-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*”

Mengenai *collaborative governance* tersebut dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan aransemen pengaturan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu 46arik4646 46arik46 bersama *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi 46arik4646ma dan deliberative Kolaborasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengelola 46arik atau program 46arik46. Terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam kolaborasi . Berikut merupakan tahapan dalam pelaksanaan tata 46arik46 kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens.

Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah penilaian (46arik4646ma46). Tahap ini membahas tentang kondisi awal yang mempengaruhi apakah kolaborasi diperlukan dan memungkinkan atau tidak. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahap penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan atau tidak untuk dilaksanakan. Tahapan penilaian meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Memahami faktor-faktor kontekstual misalnya sejarah,46arik4646ma dan insentif kelembagaan atau kendala 46arik4646ma (Ansell dan Gash, 2007; Bryson et al., 2006 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568))
- b. Identifikasi *stakeholder* (chrislip, 2002; Gray,1989; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568));



- c. Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai (Bryson et al, 2006; Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- d. Komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif (Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2010:568))
- e. Identifikasi peran kunci yang termasuk konvener, sponsor serta identifikasi sumber daya (Carson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Bryson et al, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Dalam rangka mengidentifikasi tahapan penelitian apakah kolaborasi dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Tahapan selanjutnya ialah tahapan inisiasi. Tahapan ini mencakup kegiatan rapat *stakeholder*, membangun kelompok kerja dan proses desain (Carlson,2007; Chrislip,2002; Gray, 1989, Luke 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Berbeda dengan tahapan penilaian yang lebih menekankan pada kegiatan analisis kemampuan, tahapan inisiasi lebih menekankan pada soft skill penyelenggaraan 47arik4747ma, membangun 47arik4747ma dan membentuk tim (alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012;568)).

Berhasilnya membangun *stakeholder* untuk bekerjasama, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan musyawarah (Deliberation). Tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar (Gray,1989;Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Kegiatan selanjutnya adalah

mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses belajar bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan (Carlson,2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)). Pada akhirnya tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif (Chirik,2007 ; Chirslip, 2002;Gray, 1989; Luke 1998 (dalam Morse dan Stephens.2012:568)).

Tahapan implementasi merupakan tahapan terakhir dalam membangun kolaborasi governance yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan berikut ini (Morse dan Stephens (2012:569)) :

- a. Merancang struktur;
- b. Membangun dukungan konstituen;
- c. Memantau perjanjian, evaluasi hasil dan mengelola.

Tahapan implementasi inilah yang merupakan tahapan yang menentukan apakah kolaborasi itu dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya dalam proses kerja sama terjadi suatu permasalahan. Dari pengertian mengenai tahapan-tahapan kolaborasi, peneliti memilih untuk meneliti semua tahapan-tahapan dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Payangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberejo dan Komunitas Wisata setempat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahap-tahap kolaborasi dalam teori Collaborative Governance oleh Morse dan Stephens.

#### **2.1.9.1 Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja Sama**

Menurut Wawan Muhwan (2011:126) bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan atau tidak tertulis.

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Akan tetapi, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalnya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang. Untuk itu, adalah notaris, camat PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta otentik) yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan kewenangan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notaris merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisasi suatu fakta. Dalam penelitian ini, usaha kolaborasi Pemerintah Desa dengan komunitas wisata dalam pengelolaan wisata di Pantai Payangan ini menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan.

## **2.2. Kerangka konsep**

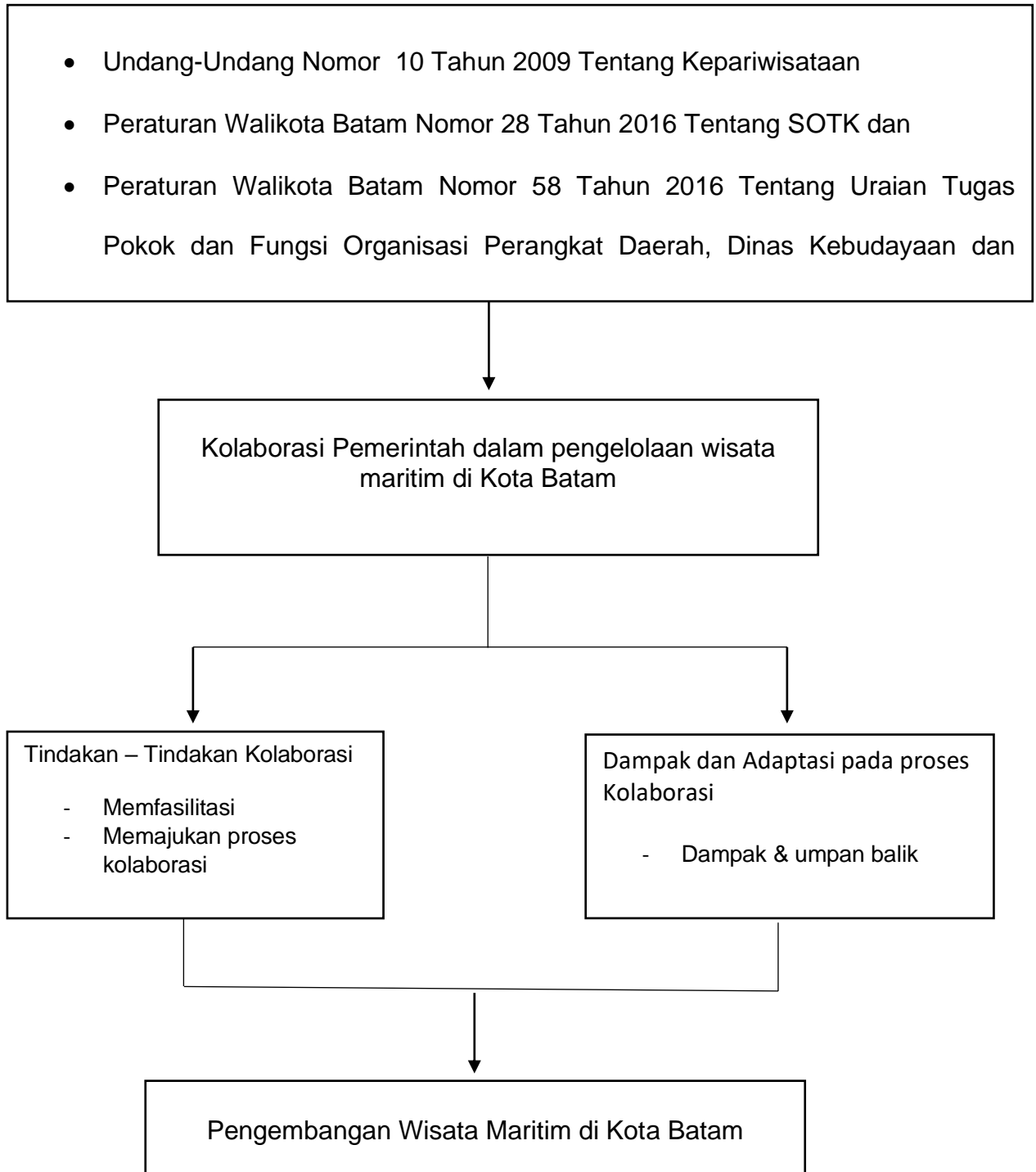
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan. (Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata).

Dinas Pariwisata sebagai salah satu dinas di Kota Batam adalah organisasi pariwisata daerah yang bertugas dalam menjalankan roda

pembangunan di 51arik51 pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan daya 51arik wiasata dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan sebagai fungsi dari tupoksi Dinas pariwisata di Kota Batam.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana kolaborasi Dinas Pariwisata Kota Batam bersama Pokdarwis dalam Pengelolaan pariwisata di Kota Batam. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut.

**BAGAN KERANGKA KONSEP :**



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal atau setelah surat perizinan telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam dengan pertimbangan bahwa pengelolaan pariwisata di Pulau Abang yang melibatkan kelompok sadar wisata belum maksimal dan di lokasi tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

1. Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengizinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Pada tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokuskan pada kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan pariwisata. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pengelolaan pariwisata dalam bentuk collaborative governance

### 3.3 Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batam
2. Kepala bidang pengembangan dan promosi wisata Kota Batam
3. Kepala / staf Kantor Camat galang Kelurahan Pulau Abang
4. Pengelola tempat objek wisata di Kota Batam
5. Masyarakat sekitar Pulau Abang di Kota Batam
6. Wisatawan lokal dan asing di Kota Batam
7. Pelaku usaha (pemilik resort, penyebrangan, pedagang kaki lima)

**Tabel 4. Tabel Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Miranthy Adhisthy. S.STP,M.SI	Kabid sarana dan objek wisata
2.	Dra. Ratna Sari	Kabid pengembangan dan promosi
3.	Ledi Seman	Ketua Pokdarwis
4.	Acmad Suwito	Pelaku usaha
5.	Yudis santoso	Pelaku usaha



### **3.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Data primer

Data yang di peroleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan berupa data interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Obsevasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap peran Dinas pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di Kota Batam
2. Wawancara (interview), yaitu teknik pengeumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.

3. Studi kepustakaan (library research) yaitu, dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain.
4. Dokumentasi data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan di atas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

### **3.6 Fokus penelitian**

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan focus penelitian yang dioperasikan melalui beberapa indicator sebagai berikut:

- a. Wisata maritim adalah merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didalamnya taman laut.
- b. Wisata Pulau Abang memiliki potensi yang cukup besar dalam menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Abang. Potensi yang dimiliki Pulau Abang cukup beraneka ragam seperti *snorkeling*, pasir putih, pesona terumbu karang dan berbagai hal lain yang dapat membuat para wisatawan tertarik untuk

mengunjungi destinasi wisata tersebut. Namun dalam Catatan Dinas Pariwisata Kota Batam (2017 – 2019) memberikan keterangan bahwa jumlah pengunjung pulau Abang setiap tahun semakin menurun.

- c. Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Kemudian pemerintahan daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
- d. *Stakeholder* adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. *Stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi.
- e. Tindakan-Tindakan Kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan guna membantu dalam pengelolaan wisata Pulau Abang di Kota Batam.
- f. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam

proses kolaborasi dalam pengelolaan wisata Pulau Abang di Kota Batam.

### **3.7 Analisis data**

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.